

**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN PROF. DR. SADU WASISTIONO, M.S.
MENGENAI ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

***Danu Yanuar Saputra¹, Ismail Nurdin² & Jona Bungaran Basuki Sinaga³**

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: Danuyanuar47@gmail.com

ABSTRACT

Throughout the history of a nation, reflections on governance often serve as a mirror of the spirit and direction of the civilization it aspires to achieve. This thesis explores the intellectual contributions of Prof. Sadu Wasistiono Wasistiono, a scholar who, in the twilight of his academic career, has significantly influenced the theoretical foundations and practical discourse of governance in Indonesia. This research employs a descriptive methodology with a qualitative approach. Data collection methods include field research— comprising observations, interviews, and documentation—and library research through literature review. The data is analyzed using techniques such as data reduction, data display, and conclusion drawing with verification. The findings reveal that Prof. Sadu Wasistiono Wasistiono's thoughts significantly contribute to the development of governance studies and remain highly relevant in addressing contemporary governance challenges. However, the research identifies several critical issues: the limited availability of theories, concepts, and models in governance studies; a persistent egotism among intellectual elites in articulating their viewpoints; and inadequate incentives and visibility for research and publications in Indonesia compared to countries like the United States and Japan. The study underscores the urgency of fostering a spirit of collaboration among intellectual elites and between academics and government stakeholders. Such collaboration is essential for developing governance theories rooted in local contexts yet aligned with international standards. Furthermore, the study advocates for increased incentives for research and publication, alongside the adoption of best practices from other countries, to enhance governance standards and contribute to national and global progress.

Keywords: Study Of Figure, Elit Intellectual, Governance Science

PENDAHULUAN

Elit intelektual adalah sekelompok individu yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan, penyebaran, dan penerimaan teori dan ide dalam masyarakat. Mereka sering kali berperan sebagai pemikir utama yang membentuk pandangan dunia dan kebijakan melalui karya tulis, penelitian, dan pengajaran mereka.

Pada poin *expert power* ketokohan seseorang bisa didapat berdasarkan persepsi atau keyakinan seorang tokoh tersebut memiliki keahlian atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. *Expert power* ini bisa dikatakan merujuk pada suatu tenaga ahli atau profesional di bidang tertentu. Keberadaan *expert power* sering kali memengaruhi pengambilan keputusan karena dianggap memiliki otoritas berdasarkan kompetensi. Selain itu, otoritas yang berasal dari *expert power* ini biasanya tidak tergantikan oleh kekuasaan formal atau jabatan semata.

Fokus studi dalam penelitian ini adalah terkait dengan Ilmu Pemerintahan. Seiring dengan semakin banyak perguruan tinggi yang mendirikan program studi Ilmu Pemerintahan, yang tentunya

memberikan definisi yang beragam terkait topik tersebut. Tentunya hal ini menjadi kajian yang menarik dalam dinamika perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia dan menjadi stimulasi tersendiri bagi para akademisi, ahli, dan pakar pemerintahan di Indonesia untuk menghadirkan Ilmu Pemerintahan khas Indonesia.

Ilmu pemerintahan merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki peran strategis dalam pembentukan tata kelola negara yang baik dan berdaya saing. Namun demikian, hingga saat ini, pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan fundamental, terutama terkait dengan minimnya konsep dan teori (Sadu Wasistiono, 2024:2) yang mampu menggambarkan realitas pemerintahan yang kompleks di Indonesia. Banyak teori dan konsep yang diadopsi dari tradisi pemikiran Barat sering kali tidak sepenuhnya relevan ketika diterapkan pada konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia yang unik.

Hal ini menciptakan kesenjangan antara teori yang diajarkan dalam ruang-ruang akademik dan praktik pemerintahan di lapangan. Dalam kondisi ini, pemikiran dari tokoh-tokoh intelektual seperti Prof. Sadu Wasistiono menjadi sangat penting sebagai upaya untuk memperkaya dan memperkuat ilmu pemerintahan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Prof. Sadu Wasistiono dikenal sebagai salah satu akademisi dan praktisi yang memiliki perhatian mendalam terhadap pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Gagasannya tidak hanya membahas aspek teoretis, tetapi juga mencakup solusi aplikatif yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan daerah dan nasional. Salah satu persoalan yang sering diangkat oleh Prof. Sadu Wasistiono adalah posisinya sebagai konseptor, terkadang sering mengisi diskusi yang panjang di banyak wilayah pemerintahan daerah di Indonesia, tentunya diharapkan hasil diskusi itu menjadi komitmen untuk langsung diaplikasikan dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang responsif dan partisipatif.

Namun, kontribusi pemikiran ini sering kali kurang mendapatkan perhatian optimal, terutama karena minimnya sinergi antara elit intelektual di lingkungan akademik dan pemangku kebijakan pemerintahan di lapangan sehingga diskusi yang telah berjalan panjang hanya berlalu begitu saja tanpa menjadi perda yang mengandung komitmen legalistik berdasarkan payung hukum.

Ego hubungan antar elit intelektual di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan ilmu pemerintahan (Sadu Wasistiono: 19 juli 2024). Alih-alih bekerja sama untuk mengembangkan konsep dan teori yang dapat menjadi landasan bagi praktik pemerintahan yang lebih baik, terkadang sesama elit intelektual merasa pendapatnya paling benar sendiri. Kondisi ini menciptakan fragmentasi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, di mana masing-masing kelompok atau individu cenderung mempertahankan pandangan atau pendekatannya sendiri tanpa membuka ruang dialog yang konstruktif. Dalam konteks ini, Prof. Sadu Wasistiono menjadi salah satu figur yang mencoba menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui tulisan-tulisan dan kontribusinya dalam berbagai forum, Prof. Sadu Wasistiono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin untuk menciptakan ilmu pemerintahan yang lebih relevan dengan kebutuhan bangsa.

Minimnya konsep dan teori yang spesifik dalam ilmu pemerintahan juga berdampak pada lemahnya dasar ilmiah dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia. Banyak kebijakan yang diambil lebih berdasarkan pendekatan pragmatis tanpa landasan teoretis yang kuat (Wasistiono, Sadu: 19 juli 2024), sehingga rentan terhadap ketidakefisienan dan inkonsistensi. Dalam hal ini, pemikiran

Prof. Sadu Wasistiono yang mengusung pendekatan berbasis realitas lokal dapat menjadi solusi yang signifikan.

Prof. Sadu Wasistiono mengajukan model pemerintahan daerah yang memperhatikan keragaman budaya dan sosial di Indonesia, yang sering kali diabaikan dalam pendekatan teori-teori pemerintahan yang bersifat generik. Dengan demikian, pengembangan ilmu pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab akademisi, tetapi juga menuntut kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang semakin dinamis, pemikiran para intelektual diuji dengan relevansi terhadap fakta kemajuan peradaban yang semakin canggih dan modern. Pemerintahan modern membutuhkan konsep dan teori yang tidak hanya aplikatif tetapi juga mampu merespons dinamika global tanpa kehilangan akar lokalitasnya. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci untuk menciptakan ilmu pemerintahan yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga berdampak nyata pada perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Metode Penelitian Studi Tokoh oleh (Furchan dan Maimun, 2005:1) bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi pemikiran sang tokoh dalam fokus studi sesuai keahliannya, baik dalam hal pengembangan ilmu maupun konteks praktik pemerintahan. Urgensitas adanya penelitian mengenai kontribusi Pemikiran Prof. Sadu Wasistiono dengan relevansi terhadap bagaimana ilmu pemerintahan dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif.

Melalui studi ini, diharapkan dapat terungkap lebih jauh kontribusi pemikiran Prof. Sadu Wasistiono terhadap pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan minimnya teori yang kontekstual dan ego sektoral antar elit intelektual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong transformasi ilmu pemerintahan ke arah yang lebih relevan dan aplikatif sesuai kebutuhan bangsa.

Di sisi lain, ego antar elit intelektual sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan sinergi yang diperlukan untuk menghasilkan pemikiran baru. Michel Crozier (1964) dalam *The Bureaucratic Phenomenon* menyoroti bahwa birokrasi baik dalam institusi pemerintahan maupun akademik rentan terhadap konflik kepentingan dan ego sektoral, yang menghambat kolaborasi produktif. Dalam lingkungan akademik Indonesia, termasuk dalam pengembangan ilmu pemerintahan, dinamika ini terlihat dari masih tidak sinergis antar elit intelektual dalam membangun teori yang lebih relevan dengan konteks lokal.

Selain minimnya konsep dan teori dalam ilmu pemerintahan, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah urgensi publikasi dalam dunia akademisi Indonesia. Di era globalisasi, eksistensi dan pengaruh akademisi sering kali diukur dari sejauh mana publikasi ilmiah mereka diakui secara internasional. Namun, akademisi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya jumlah publikasi di jurnal bereputasi internasional dan terbatasnya akses terhadap sumber daya untuk mendukung penelitian berkualitas tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas publikasi ilmiah yang tidak hanya berdampak pada pengakuan global, tetapi juga memperkuat posisi akademisi sebagai penghasil ilmu pengetahuan baru.

Selanjutnya, hal ini juga dijadikan pertanda dari sebuah komunikasi ilmiah perkembangan ilmu pengetahuan yang dicirikan dari produktivitas karya menunjukkan posisi dan kredibilitas seorang tokoh. Dalam buku (Furchan dan Maimun, 2005:41) "bahwa penelitian Studi Tokoh adalah untuk

memperoleh persepsi tokoh dalam bidangnya, memperoleh teknik dan strategi yang digunakannya, memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk keberhasilan sang tokoh, dan mengambil hikmah dari keberhasilan sang tokoh”.

Pendekatan studi tokoh ini telah ada sejak lama dan digunakan oleh banyak peneliti. Di zaman dahulu, sejarawan Yunani Kuno dan para sejarawan Islam, seperti Ibnu Khaldun, sudah memanfaatkan metode ini dalam menyusun karya-karya mereka. Bahkan, pada masa kini, metode tersebut masih relevan dan banyak digunakan, baik oleh sejarawan maupun oleh tokoh-tokoh itu sendiri melalui tulisan otobiografi atau memoar mereka.

Di Amerika Serikat, ketertarikan terhadap riwayat hidup tokoh-tokoh tertentu semakin berkembang pada pertengahan abad ke-19, seiring berakhirnya Perang Inian. Karangan-karangan mengenai suku-suku Inian yang mulai punah ini awalnya dianggap kurang berarti, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai dihargai sebagai bagian dari sejarah dan kebudayaan yang unik.

Sementara itu, di Indonesia, penggunaan studi tokoh dalam bentuk memoar juga semakin populer. Awalnya, karya-karya tersebut lebih bersifat sastra, dengan penekanan pada keindahan bahasa. Namun, seiring berkembangnya waktu, studi tokoh ini mulai diadopsi oleh lembaga pendidikan tinggi dan diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah sebagai bagian dari tugas akhir mahasiswa. Sebagai karya ilmiah, studi ini kemudian dibingkai dengan pendekatan metodologis dan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara sosiologis, seorang tokoh merupakan produk dari masyarakat dan budaya yang mengelilinginya. Pemikiran seorang tokoh seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial di mana ia tumbuh dan berkembang. Dalam budaya lama, tokoh biasanya diidentikkan dengan sosok yang memiliki pengaruh besar, seperti kiai, kepala desa, atau pejabat, yang menjadi contoh dalam menjalankan kehidupan dengan benar. Namun, dalam konteks modern, tokoh lebih sering dikaitkan dengan profesionalisme. Seperti yang dijelaskan oleh Mochtar Buchori, seorang ilmuwan atau tokoh dalam budaya modern adalah individu yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu setelah menekuninya dalam waktu yang cukup lama, yang akhirnya menjadikannya seorang profesional.

Sebagai seorang profesional, tokoh tersebut diharapkan untuk mematuhi etika profesinya, yang memengaruhi tindakan sehari-hari mereka. Setiap tokoh memiliki ciri khas pemikiran yang berbeda, yang penting untuk dianalisis guna memahami lebih dalam gagasan-gagasan besar yang mereka miliki. Oleh karena itu, studi tokoh menjadi penting untuk menelusuri bagaimana para tokoh besar menghasilkan temuan-temuan penting dalam keilmuan.

Studi tokoh adalah upaya sistematis untuk meneliti, menggali, dan mengembangkan data serta informasi tentang seorang tokoh dan pemikirannya. Proses ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai tokoh tersebut. Dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi, hadirnya tokoh yang mampu mengeksplorasi akalannya membawa dampak besar dalam perkembangan pemikiran dan penemuan yang terjadi. Dalam kajian pemikiran, studi tokoh mencakup analisis sistematis terhadap ide-ide seorang pemikir, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Aspek yang dikaji meliputi latar belakang pemikir, baik internal maupun eksternal, perkembangan pemikiran, hal-hal yang mendapat perhatian maupun yang kurang diperhatikan, kekuatan dan kelemahan dari pemikiran tersebut, serta kontribusinya terhadap perkembangan zamannya.

Dari perspektif historiografi, sejarah dipengaruhi oleh lima faktor utama: kekuatan dewa, rencana besar Tuhan, gagasan-gagasan besar manusia, tokoh-tokoh besar, serta keadaan sosial dan

ekonomi pada masa itu. Dari lima faktor ini, dua yang sangat menentukan adalah tokoh-tokoh dan gagasan-gagasan yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, studi tokoh menjadi elemen penting dalam memahami perjalanan sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Adapun metode penelitian dimaknai sebagai suatu cara atau jalan yang ditempuh seorang peneliti dalam penelitiannya.

Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk sebuah penelitian juga menentukan hasil dari penelitiannya tersebut. Jenis penelitian dalam penelitian yang berjudul “Studi Terhadap Pemikiran Profesor Sadu Wasistiono Mengenai Ilmu Pemerintahan di Indonesia” adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi kepada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi dan motivasi. Definisi penelitian kualitatif yang telah dipaparkan bila dikaitkan dengan penelitian dalam hal ini adalah bahwa peneliti bermaksud melakukan penelitian secara alamiah untuk memahami terhadap subjek penelitian yaitu riwayat hidup seorang tokoh, perjalanan hidupnya dan pemikiran serta perannya dalam konteks Ilmu Pemerintahan.

Metode penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif (Moleong, 2010:4) dengan jenis Penelitian Studi Tokoh (Furchan & Maimun, 2005:41) terhadap Pemikiran Profesor Sadu Wasistiono mengenai Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat menyelidiki lebih mendalam mengenai konsep-konsep filosofis mengenai epistemologi, ontologi, dan aksiologi Ilmu Pemerintahan serta metodologi, Teknik dan Strategi yang digunakan oleh Profesor Sadu Wasistiono mengenai Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Yang nantinya akan mendeskripsikan kontribusi Profesor Sadu Wasistiono berdasarkan keterangan beliau melalui Pedoman Wawancara yang disusun Peneliti.

Kemudian menurut (Kaelan, 2006:32), metode penelitian deskriptif tentang pemikiran yang dihasilkan oleh seorang tokoh yaitu berupaya untuk mengkaji, melukiskan dan menjelaskan ciri-ciri esensial sistem pemikiran, unsur-unsur sistem serta hubungan antara unsur-unsur sistem tersebut. Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka terutama karya-karya Profesor Sadu Wasistiono sebagai objek kajian. Sumber data Untuk melacak, memahami, dan menganalisis konsep Ilmu Pemerintahan dalam pemikiran Ilmu Pemerintahan, penelitian ini didasarkan pada sumber data yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu primer dan sekunder. Data primer yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini adalah hasil wawancara sedangkan data sekunder adalah beberapa karya Profesor Wasistiono berupa buku, artikel/jurnal, dan makalah atau karya dengan topik serupa oleh tokoh lainnya.

PEMBAHASAN

Tren Pemikiran Prof Sadu Wasistiono Mengenai Ilmu Pemerintahan di Indonesia Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia

Sejak zaman kuno yaitu 3000 SM hingga abad ke-5 Masehi, konsep kepemimpinan dan pemerintahan telah menjadi bagian integral dari perkembangan peradaban manusia. Dalam sejarah,

perbincangan mengenai cara-cara untuk mengatur masyarakat dapat ditelusuri kembali ke tiga pusat peradaban awal: Mesopotamia, Yunani, dan Mesir. Mesopotamia, yang sering dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban, meneyeikan fondasi awal bagi konsep pemerintahan. Di pusat peradaban ini, yang terletak di antara sungai Tigris dan Efrat, masyarakat menghadapi tantangan kompleks terkait pengelolaan sumber daya, perdagangan, dan keamanan. Dalam upaya menanggapi tantangan tersebut, muncul sistem pemerintahan yang terorganisir. Para raja, yang seringkali dianggap sebagai utusan dewa, mengendalikan wilayah dan menetapkan kode hukum, seperti Kode Hammurabi. Pemerintahan di Mesopotamia tidak hanya berfungsi untuk menjaga kedamaian, tetapi juga untuk mengatur aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang mendasar.

Beranjak ke Yunani, pemikiran mengenai pemerintahan berkembang pesat dengan munculnya berbagai model politik, seperti demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Kota-kota negara (*polis*) seperti Athena dan Sparta menjadi pusat diskusi tentang hak-hak individu, partisipasi warga negara, dan tugas pemimpin. Filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles mengemukakan gagasan mengenai idealisme dan realisme dalam pemerintahan. Plato, dalam karyanya "Republik," membahas konsep pemerintahan yang dipimpin oleh para "filosof-raja" yang bijaksana, sementara Aristoteles mengkaji berbagai bentuk pemerintahan dan mengusulkan bahwa pemerintahan terbaik adalah yang menyeimbangkan kekuasaan antara rakyat dan elit.

Sementara itu, di Mesir, pemerintahan sangat erat kaitannya dengan pengaruh agama. Firaun dianggap sebagai manifestasi dewa di bumi dan menjadi lambang kekuasaan absolut. Struktur pemerintahan Mesir Kuno dibangun di atas hierarki yang ketat, di mana fungsi pemerintahan dijalankan oleh birokrasi yang berkomitmen pada pengabdian terhadap firaun. Sistem pertanian yang melibatkan pengairan dari sungai Nil membutuhkan pengelolaan yang cermat, menjadikan peran pemerintah dalam mengatur dan mendukung pertanian sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Mazhab Eropa Kontinental, yang berakar dari hukum Romawi, mulai mempengaruhi ilmu pemerintahan di Indonesia ketika Belanda menjajah pada awal abad ke-17. Tradisi ini membawa perspektif yang sangat menekankan pada aspek hukum dan administrasi. Dalam konteks ini, konsep "bestuurkunde" diperkenalkan sebagai suatu pendekatan formal dalam pengelolaan pemerintah. Sistem administrasi yang dibawa oleh Belanda mengedepankan struktur birokrasi yang tertata, di mana segala tindakan pemerintahan harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengaruh mazhab ini terlihat dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum, serta dalam pendidikan tinggi yang mempersiapkan aparat pemerintahan yang memenuhi kriteria legalitas dan kepatuhan terhadap hukum.

Mazhab Anglo-Saxon memasuki Indonesia pada abad ke-20, terutama setelah kemerdekaan tahun 1945, dengan pengaruh dari akademisi yang terdidik di Inggris dan Amerika Serikat. Tradisi ini mengedepankan pendekatan yang lebih praktis, di mana ilmu pemerintahan dipandang sebagai gabungan dari politik dan administrasi publik. Fokus utama mazhab ini adalah pada pengembangan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta manajemen pemerintahan yang efisien. Pendekatan ini mendorong para pelaku pemerintahan untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga untuk memperhatikan dampak sosial dari kebijakan dan keputusan administrasi. Dengan demikian, mazhab Anglo-Saxon berkontribusi dalam menekankan pentingnya partisipasi masyarakat

dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, yang mengarah pada peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia.

Kedua mazhab ini secara signifikan membentuk pemahaman dan praktik ilmu pemerintahan di Indonesia, menciptakan dinamika yang kompleks antara aspek hukum, administrasi, dan politik dalam konteks lokal. Ilmu Pemerintahan klasik lebih banyak membahas mengenai ontologi, dan epistemologi dalam rangka meneguhkan jatidiri sebagai ilmu. Serta lebih banyak menggunakan cara pandang konvergen dan monodisiplin. Sedangkan ilmu pemerintahan kontemporer lebih banyak membahas mengenai aksiologi agar lebih banyak memberikan manfaat bagi manusia serta lebih banyak menggunakan cara pandang divergen dan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. (Sadu Wasistiono, 2017:165).

Tren Pemikiran Prof Sadu Wasistiono dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia

“Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala, tindakan, dan peristiwa pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum oleh instansi atau individu pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dengan tujuan untuk membuat masyarakat bahagia” (Sadu Wasistiono, 2017:75). Kedewasaan sebuah Ilmu dapat dilihat dari Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi yang sudah mapan dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Sebab Ilmu Pemerintahan bukan berasal dari aliran utama pengembangan ilmu yang datang dari anglo saxon. Meskipun seiring perkembangan zaman ilmu pemerintahan menunjukkan kemajuan dan peminatan. Akan tetapi dibandingkan dengan ilmu lain nya Ilmu Pemerintahan masih dianggap kekurangan konsep, teori, model, dan strategi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena aktual.

“Persoalan Ilmu Pemerintahan karena kita kekurangan konsep akhirnya meminjam konsep tempat lain tanpa mempertimbangkan asumsi. Berbicara teori itu lima komponen, yang pertama asumsi. Jika kita menggunakan teori ilmu lain atau dari negara lain perhatikan asumsi nya. Yang kedua konsep, yang ketiga relationship, yang keempat *unit of analysis*, kelima *scoup of theory*. Saya coba menjelaskan itu masing-masing. Saya banyak menulis dan meneliti bersama teman-teman akademisi IPDN, UIR, UNLA dan Unjani.”

Bukan hanya itu Prof Sadu juga memahami benar mengenai kajian historis terkait Ilmu Pemerintahan dengan keterangan sebagai berikut: “Sejarah Ilmu Pemerintahan awalnya muncul dari zaman jerman, prancis dan belanda. Kemudian kalah perang oleh amerika. Dan sejarah ditulis oleh pemenang, ia tidak ingin menggunakan istilah *government*. Tapi *public administration*. Tapi kalau lihat isinya hampir mirip. *Government Science* sudah dibicarakan sejak tahun 1800an bisa di akses di *Microsoft Digititation*. Arsip internasional yang mengumpulkan buku-buku lawas yang tidak diterbitkan lagi.”

“Selanjutnya mengenai Ilmu Pemerintahan Pancasila, sudut pandang terhadap masa lalu Indonesia dalam menambah wawasan referensi mengenai pengembangan Ilmu Pemerintahan di Indoensesia. Seperti kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Saya sedang mengumpulkan informasi mengenai itu semua, ada tapi tidak banyak, misalnya buku sapta parwa dari Muhammad yamin yang bicara mengenai *history of Java*, lalu buku empu Tantular yang mestinya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia”

Pemahaman tentang sejarah Ilmu Pemerintahan, yang bermula dari ranah global dan kemudian diperkenalkan di Indonesia melalui kehadiran Belanda, membentuk dasar bagi penerimaan terhadap kelebihan serta kekurangan dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan yang ada saat ini. Namun, dalam

kajian Ilmu Pemerintahan, Prof. Sadu Wasistiono memberikan penekanan khusus pada konsep kewenangan.

“Kalo ilmu politik bicara kekuasaan, administrasi publik sama sekali tidak berbicara mengenai kewenangan, ilmu pemerintahan titik tekannya pada kewenangan. Kewenangan sebagai *legitimate power* itu dari power politik kemudian dilegalisasi oleh hukum menjadi kewenangan terlegitimasi. Jadi kewenangan pemerintahan turun dari kekuasaan politik. Waktu menyusun pemikiran strategik orang mengabaikan authority, ada analisis kekuatan juga kelemahan namun saat menyusun strategi tidak bisa lepas dari yang namanya kewenangan. Untuk apa kita menjelaskan strategi jika strategi tersebut tidak menjadi kewenangan entitas pemerintahan. Makannya saya ganti menjadi SOAR (Strength, Opportunity, Othority, Result). Karena di pemerintahan berbicara anggaran berbasis kinerja itu ujungnya pada hasil. Kewenangan adalah salahsatu bentuk kekuasaan (*power*) yang telah terlegitimasi (*legitimated power*) dan telah terlembagakan (*institutionalized power*). Legitimasi kekuasaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, mempelajari Ilmu Pemerintahan diperlukan kompetensi legalistik yang sekaligus menggambarkan kedekatannya dengan ilmu hukum. “Ilmu Pemerintahan adalah *Applied Science*, bukan Ilmu Murni (*Pure Science*). dipadukan antara teori dan praktek.”

Prof Sadu Wasistiono menegaskan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu Terapan, “*Applied Science*”, bukan ilmu murni (*Pure Science*). Konsekuensi logisnya yaitu penelitian yang dilakukan nantinya akan masuk kategori penelitian terapan (*Applied Research*). Dengan tetap membuka kemungkinan penelitian murni. Pembelajar Ilmu Pemerintahan perlu memiliki kompetensi empiris, dalam arti paham tentang dunia empiris, serta tidak menjadi ilmuwan Menara Gading. Prof. Sadu Wasistiono menyampaikan konsep penting dalam Orasi Ilmiah nya. Fokus utama dalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sadu Wasistiono adalah mengenai "Empat Pilar Dalam Ilmu Pemerintahan." Dalam orasi tersebut, beliau menekankan pentingnya pengembangan teori-teori baru dalam ilmu pemerintahan untuk meningkatkan aksiologi ilmu ini di mata masyarakat. terdiri dari:

Kewenangan: Pilar ini merupakan dasar dari seluruh aktivitas pemerintahan. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang telah terlegitimasi dan terlembagakan. Kewenangan menjadi pembeda antara ilmu pemerintahan dan ilmu lain yang serumpun, seperti ilmu politik dan administrasi publik. Dalam pilar ini, penting untuk mempelajari sumber-sumber dan teori-teori kewenangan yang membuat pemahaman tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dalam pemerintahan semakin mendalam.

Relasi: Pilar ini membahas interaksi antara pemerintahan dan berbagai entitas lain, serta bagaimana hubungan ini dibangun untuk mencapai tujuan pemerintahan. Relasi yang baik antar pihak akan mendukung efektivitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan: Pilar ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Fokusnya adalah pada bagaimana pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta menciptakan kepuasan publik. Pelayanan publik yang baik dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintahan.

Kesejahteraan dan Kebahagiaan: Pilar ini adalah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Semua tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menggunakan kewenangan, membangun relasi, dan memberikan pelayanan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Prof. Sadu Wasistiono menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah harus

diukur dari sejauh mana masyarakat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, mengisyaratkan bahwa ini adalah "nilai utama" dalam ilmu pemerintahan.

Pemikiran Prof. Sadu Wasistiono sangat relevan dengan pengembangan ilmu pemerintahan, karena beliau tidak hanya melihat ilmu pemerintahan sebagai sebuah disiplin akademik yang statis, tetapi sebagai suatu bidang yang terus berkembang, penuh dinamika, dan memerlukan pendekatan yang fleksibel serta kritis. Dalam konteks ini, beliau mengintegrasikan teori-teori besar dalam ilmu pemerintahan dengan realitas praktis yang ada di lapangan, menciptakan hubungan yang kuat antara teori dan praktik pemerintahan. Relasi ini sangat penting untuk memahami perkembangan karya dan pemikiran Prof. Sadu Wasistiono dalam ilmu pemerintahan.

Prof. Sadu Wasistiono berpendapat bahwa ilmu pemerintahan tidak dapat dipandang sebagai sebuah bidang yang kaku, tetapi harus terus berkembang seiring dengan tantangan dan kebutuhan yang ada dalam praktik pemerintahan. Dengan pendekatan dialektik dan terbuka, beliau melihat ilmu pemerintahan sebagai arena untuk terus mengeksplorasi berbagai teori, metode, dan solusi yang dapat diadaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi.

Hal ini selaras dengan pemikiran para tokoh yang beliau idolakan, seperti Samuel E. Finer yang menulis karya penting dalam kajian teori pemerintahan dan birokrasi. Finer (1941) memberikan pemahaman tentang bagaimana negara dan birokrasi bekerja serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang sangat relevan dengan praktik pemerintahan. Prof. Sadu Wasistiono melihat bahwa ilmu pemerintahan harus mampu menjawab tantangan nyata dalam sistem pemerintahan, dan oleh karena itu, pengaruh dari tokoh-tokoh seperti Finer memberikan landasan untuk membangun teori pemerintahan yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Selain itu, Peter F. Drucker sebagai bapak manajemen modern memberikan perspektif mengenai bagaimana teori-teori manajerial dapat diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan. Pemikiran Drucker (1954) yang mengedepankan efisiensi, inovasi, dan pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi sangat relevan dalam konteks pemerintahan, yang seringkali dihadapkan pada tantangan birokrasi dan pengelolaan yang kurang efisien. Pemikiran ini kemudian diterjemahkan oleh Prof. Sadu Wasistiono dalam teori-teori yang berfokus pada pembaharuan manajerial dalam lembaga pemerintahan.

Konteks Pemikiran Prof. Sadu Wasistiono dalam Praktik Pemerintahan: Pemikiran Prof. Sadu Wasistiono tidak hanya terbatas pada teori akademis, tetapi juga mencakup bagaimana teori tersebut dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Hal ini tercermin dalam cara beliau melihat pentingnya integrasi antara teori dan praktik dalam pengelolaan pemerintahan. Prof. Sadu Wasistiono memahami bahwa konsep-konsep manajerial yang diajukan oleh tokoh-tokoh seperti Drucker harus dapat diterjemahkan dalam tindakan konkret di pemerintahan, yang seringkali menghadapi kendala birokratis, keterbatasan anggaran, dan tantangan dalam pelayanan publik.

Dalam konteks ini, Prof. Sadu Wasistiono juga menunjukkan pentingnya teori pemerintahan yang adaptif. Misalnya, dalam pengembangan kebijakan publik, teori-teori yang beliau tawarkan bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan transparan. Beliau memandang pentingnya pendekatan yang fleksibel dalam memahami kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta tantangan baru yang muncul dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks.

PENUTUP

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Studi Tokoh oleh Furchan dan Maimun, Berdasarkan fakta riset proses penelitian ini tidak jauh berbeda dengan Metode Pendekatan Penelitian Deskriptif Kualitatif pada umumnya, yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah persepsi subjek penelitian terhadap fokus studi keilmuannya, kontribusi dan karya yang telah dihasilkannya.

Tren Pemikiran Prof. Sadu Wasistiono dapat kita simpulkan dari Substansi empat pilar dalam ilmu pemerintahan yang disampaikan oleh Prof. Sadu Wasistiono yang terdiri dari: Kewenangan: Pilar ini merupakan dasar dari seluruh aktivitas pemerintahan. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang telah terlegitimasi dan terlembagakan. Kewenangan menjadi pembeda antara ilmu pemerintahan dan ilmu lain yang serumpun, seperti ilmu politik dan administrasi publik. Dalam pilar ini, penting untuk mempelajari sumber-sumber dan teori-teori kewenangan yang membuat pemahaman tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dalam pemerintahan semakin mendalam; relasi: Pilar ini membahas interaksi antara pemerintahan dan berbagai entitas lain, serta bagaimana hubungan ini dibangun untuk mencapai tujuan pemerintahan. Relasi yang baik antar pihak akan mendukung efektivitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan mencapai kesejahteraan masyarakat; Pelayanan: Pilar ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Fokusnya adalah pada bagaimana pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta menciptakan kepuasan publik. Pelayanan publik yang baik dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintahan. Kesejahteraan dan Kebahagiaan: Pilar ini adalah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Semua tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menggunakan kewenangan, membangun relasi, dan memberikan pelayanan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Prof. Sadu Wasistiono menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah harus diukur dari sejauh mana masyarakat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, mengisyaratkan bahwa ini adalah "nilai utama" dalam ilmu pemerintahan 1) Kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan dan Konteks Praktis Pemerintahan sangat signifikan. Prof. Sadu Wasistiono terus mendorong cara pandang terhadap desentralisasi sebagai pembangun keadilan sosial dan kemandirian masyarakat. Lewat pelatihan dan penelitian, ia membantu menciptakan pemerintah daerah yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga ilmunya berakar kuat pada kebutuhan masyarakat. Melalui penelitian ini pula kontribusi beliau dapat diidentifikasi dari karya beliau berupa puluhan jurnal yang dapat diakses di internet, dan 25 buku yang berhasil diinventarisasi oleh peneliti. Juga rangkaian kegiatan penelitian dan sebagai agen konsultasi bagi pemerintah pusat dan daerah; 2) Selanjutnya Dedikasi dalam Kaderisasi, jelas terlihat melalui peran sebagai pendidik dan mentor. Ia menekankan tidak hanya transfer ilmu tetapi juga pembentukan karakter dan nilai moral. Melalui interaksi yang aktif dan empiris, beliau berhasil membentuk banyak alumni yang berkontribusi signifikan dalam pemerintahan dan masyarakat. Dan menghasilkan banyak guru besar, seperti Profesor Ilmu Pemerintahan termuda di Indonesia yaitu Prof. Fernandes Simangunsong. Legitimasi dan Hubungan Antar Elit Pengakuan sosial dan hubungan antar elit dalam lingkungan Profesor Sadu Wasistiono menunjukkan bagaimana peran beliau melampaui batasan akademik, menciptakan pengaruh yang luas baik di lingkup intelektual maupun praktis. Sebagai seorang akademisi terkemuka di bidang ilmu pemerintahan, beliau dikenal sebagai figur yang dihormati oleh rekan sejawat, birokrat, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Profesor Sadu mendapatkan pengakuan sosial yang tinggi karena kontribusinya yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya yang inovatif, terutama dalam bidang desentralisasi dan tata kelola pemerintahan, tidak hanya diakui di kalangan akademik tetapi juga diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Sebagai seorang intelektual, beliau dihormati atas integritas dan dedikasinya dalam memperjuangkan nilai-nilai *good governance* dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Hubungan beliau dengan para akademisi lainnya didasarkan pada kolaborasi intelektual yang saling memperkaya. Di sisi lain, hubungan dengan elit birokrasi dan pemerintahan ditandai oleh kemampuannya memberikan pandangan yang aplikatif, menjadikan beliau narasumber dan penasihat yang sering diundang dalam berbagai forum strategis.

Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang membangun jaringan profesional yang kuat. Dalam konteks ini, Profesor Sadu tidak hanya menjadi mitra diskusi yang kritis tetapi juga mentor yang mendorong kolaborasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan pemerintahan. Relasi beliau dengan berbagai elit memperlihatkan sikap inklusif, di mana beliau mampu menghargai dan memanfaatkan keberagaman pemikiran untuk kemajuan bersama. Elit didefinisikan sebagai kata dengan konotasi kalangan atas dan eksklusif, namun dari penelitian ini kita dapat memahami makna elit intelektual adalah orang yang mampu menggunakan segala tenaga dan ilmunya untuk bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat seperti yang telah ditunjukkan oleh prof. Sadu wasistiono yang sudah berpengalaman menjadi agen konsultasi terkait persoalan masyarakat dan pemerintahan diberbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. , 2003, *Public Policy-Making*, Houghton Mifflin, Boston.
- Bakker, J,W,M, 2000, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta.
- Bourdieu, Pierre, 1998, *The Logic of Practice* ,Stanford University Press, Stanford.
- Berman, Evan M, 2010, *Public Administration in Southeast Asia* CRC Press, Boca Raton.
- Bourdieu, Pierre, 1984, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* , Routledge, London.
- Berlin, Isaiah , 1990, "The Pursuit of the Ideal," in *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas*, ed, Henry Hardy, Princeton University Press, Princeton.
- Baudrillard, Jean , 1994, *Simulacra and Simulation*, University of Michigan Press: Ann Arbor.
- Bourdieu, Pierre , 1988, *On Television* , The New Press, New York, Bauman. Zygmunt, 1987, *Intellectuals: From Marx to Soros* Polity Press, Cambridge.
- Crozier, Michel, 1964, *The Bureaucratic Phenomenon*, University of Chicago Press, Chicago.
- Castells, Manuel, 1996, *The Rise of the Network Society*, MA: Blackwell, Malden.
- Castells, Manuel, 2009, *Communication Power*, Oxford University Press, Oxford.
- Chomsky, Noam, 1988, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, co-authored with Edward S, Herman, Pantheon Books, New York.

- Chomsky, Noam , 1967, *American Power and the New Mandarins*, The New Press, New York.
Chomsky, Noam, 1989, *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies*, South End Press, Boston.
- Coleman, James S , 1990, *Foundations of Social Theory*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.), Sage Publications, Amerika Serikat.
- Furchan, Arief & Agus Maimun, 2005, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Milton, 1962, *Capitalism and Freedom* , University of Chicago Press, Chicago.
- Foucault, Michel, 1969, *L'Archeologie du Savoir*, Gallimard, Perancis.
- Gladwell, Malcolm, 2000, *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference* , Little, Brown and Company, New York.
- Habermas, Jürgen, 1989, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* , MIT Press, Cambridge.
- Harahap, Syahrin, 2011, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jhon B,Thompson, 2006, *Analisis Ideologi Kritik Wacana Ideologi Dunia*, HaqqulYaqin,Yogyakarta.
- Kencana, Inu, 2013, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*,Refika Aditama, Bandung.
- Kissinger, Henry, 2014, *World Order*, Penguin Press, New York.
- Labolo, Muhadam, 2022, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Pers, Depok.
- Latief, Yudi, 2015, *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Osborne, David dan Peter Hutchinso, 2006, *The Price Of Government*, BasicBook, New York.
- Piketty, Thomas, 2013, *Capital in the Twenty-First Century* , Harvard University Press, Cambridge.
- Putnam , Robert D, 2000, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simon & Schuster, New York.
- Rasyid, Ryaas ,2000, *Makna Pemerintahan*, Mutiara Sumber Widya,Jakarta.